

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
6/PUU-XXII/2024 TENTANG INDEPENDENSI JAKSA AGUNG**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

MUHAMMAD IQBAL

NIM. 02040423020

**PASCASARJANA**

**MAGISTER HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2026**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 02040423020

Program Studi : Magister Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa keseluruhan karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, keseluruhan bagian yang ada pada di dalamnya menjadi tanggung jawab saya apabila didapati adanya temuan duplikasi.

Surabaya, 19 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



Muhammad Iqbal

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Tentang Independensi Jaksa Agung" yang ditulis oleh Muhammad Iqbal ini telah disetujui pada tanggal 18 Desember 2025.

Oleh:

Pembimbing I



**Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197803102005011004

Pembimbing II



**Dr. Achmad Fageh, M.HI.**  
NIP. 197306032005011004

### Pengesahan Penguji

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, NIM. 02040423020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari ~~salasa~~..... tanggal 6 Januari 2026 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

### Majelis Sidang Munaqosah

Ketua Penguji

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
197803102005011004

Sekretaris Penguji

Dr. Achmad Fageh, M.HI.  
197306032005011004

Penguji I

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.  
196803292000032001

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum  
196602122007011049

Surabaya, 6 Januari 2026

Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 19630327999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**  
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
 E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**PERNYATAAN PUBLIKASI**  
**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IQBAL  
 NIM : 02040423020  
 Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
 E-mail address : [miqball1705@gmail.com](mailto:miqball1705@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember ..... 2025

  
 MUHAMMAD IQBAL

## ABSTRAK

Pengangkatan Jaksa Agung sebagai pejabat strategis dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan persoalan konstitusional terkait independensi penuntutan, khususnya akibat tidak adanya pengaturan tegas mengenai pembatasan afiliasi politik dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Permasalahan ini kemudian diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 terhadap independensi Jaksa Agung, dan (2) bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan dan check and balances, teori independensi kekuasaan kehakiman, serta teori penafsiran konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan pengangkatan Jaksa Agung sebagai persoalan konstitusional yang berada pada irisan kewenangan eksekutif dan prinsip independensi penegakan hukum, dengan membatasi keterlibatan calon Jaksa Agung sebagai pengurus partai politik guna mencegah konflik kepentingan. Namun demikian, independensi yang dibentuk melalui putusan tersebut masih bersifat fungsional, dan secara yuridis menunjukkan bahwa desain kelembagaan Kejaksaan di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjamin profesionalisme dan kemandirian penuntutan.

**Kata kunci:** Independensi Kejaksaan, Jaksa Agung, Afiliasi Politik

## **ABSTRACT**

*The appointment of the Attorney General as a strategic official within the constitutional system raises constitutional issues related to prosecutorial independence, particularly due to the absence of explicit regulation on political affiliation restrictions in Article 20 paragraph (1) of Law Number 11 of 2021 concerning the Public Prosecution Service. This issue was subsequently reviewed in Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XXII/2024, which resulted in differing interpretations among the constitutional justices.*

*This research employs normative legal research using statutory, case, and comparative approaches. The research questions are: (1) how is the Constitutional Court's legal reasoning in Decision Number 6/PUU-XXII/2024 regarding the independence of the Attorney General, and (2) what are the juridical implications of the decision within the Indonesian constitutional system and in comparison with other countries. The analysis is conducted using the theory of the rule of law, the theory of separation of powers and checks and balances, the theory of judicial independence, and the theory of constitutional interpretation.*

*The results indicate that the Constitutional Court interprets the appointment of the Attorney General as a constitutional matter situated at the intersection of executive authority and the principle of prosecutorial independence, by limiting the involvement of candidates as officials of political parties to prevent conflicts of interest. However, the independence established by the decision remains functional in nature, and juridically indicates that the institutional design of the Indonesian Public Prosecution Service still has limitations in ensuring professionalism and prosecutorial independence.*

**Keywords:** *Prosecutorial Independence, Attorney General, Political Affiliation*

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>Sampul Luar</b> .....	i
<b>Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	iii
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	iv
<b>Lembar Pengesahan Tim Penguji</b> .....	v
<b>Lembar Persetujuan Publikasi</b> .....	vi
<b>Motto</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	viii
<b>Kata Pengantar</b> .....	x
<b>Daftar Transliterasi</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II</b>	
<b>KERANGKA TEORETIS DAN KONSEPTUAL INDEPENDENSI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN</b>	
A. Teori Negara Hukum .....	19
B. Teori Pemisahan Kekuasaan Dan <i>Check And Balances</i> .....	37
C. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman .....	49
D. Penafsiran Konstitusi Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	64
<b>BAB III</b>	
<b>PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 6/PUU-XXII/2024 TERHADAP INDEPENDENSI JAKSA AGUNG</b>	
A. Konteks Konstitusional Pengujian Norma Pengangkatan Jaksa Agung.....	74
B. Konstruksi Permasalahan Hukum dalam Pengujian Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan.....	76
C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi mengenai Independensi Jaksa Agung .....	79
D. Variasi Pertimbangan Hakim dalam Concurring Opinion dan Dissenting Opinion .....	82

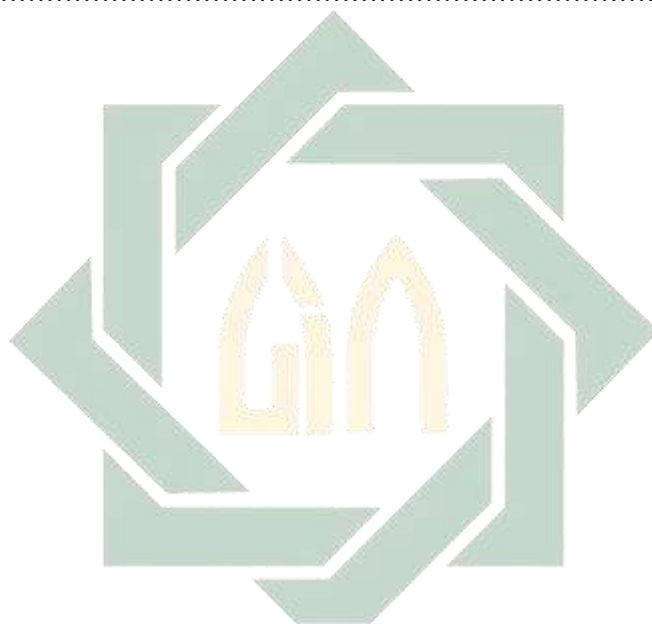
**BAB IV****IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6/PUU-XXII/2024 DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI JAKSA AGUNG DAN PERBANDINGAN HUKUM**

- A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024  
Tentang Independensi Jaksa Agung.....88

**BAB V PENUTUPAN**

- A. Kesimpulan .....104  
B. Saran .....105

**LAMPIRAN..... 109**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi sakinah Agustina Riyanto, Katika Sasi Qahyuningrumiar, dan Suryani Yusi. “Analisis Yuridis Dominus Litis Perkara Terhadap Independensi Kejaksaan: Perbandingan Hukum Pidana Dan Belgia.” *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 7, no. 3 (2025).
- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, dan Savina Niken M. “Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024).
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Edisi revisi 4. Rineka Cipta. (1998).
- Artyo, Yovereld Alexetty, Novita Aristyana, dan Aline Philia Antana Sinaga. “Implikasi Putusan mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-XXII/2024 mengenai syarat jabatan jaksa agung terhadap Independensi Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana.” *JATISWARA*. Vol. 39, no. 2.(2024).
- Asshiddiqie, Jimly. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II.” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.(2006).
- Elizabeth, Vivi, dan Ade Adhari. “Kepastian Hukum Akibat Kelalaian Jaksa Penuntut Umum.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024).
- Fadillah Nor, “ Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Lex Renaissance*, No. 4 Vol. 7 Oktober. (2022).
- Farizi, Rapif Sultan Al, dan Ahmad Naufal Nabawi. *Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Soasial Humaniora. (2023).
- Fauziyah, Wiwin dan Farkhani. “Analisis Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan dalam Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 2 (2025).
- Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, dan Ryan Fani. *Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Vol.07 No.02 (2024).
- Ferdian Rinaldi, Ari Wibowo, dan Ryan Fani. *Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Vol.07 No.02 (2024).

- Firman. "Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pengarus Pilkada Langsung.". *The Indonesian Journal Of Public Administration*. (2017).
- Gerry Pamungkas. "Independensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, (2015).
- H.P Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Bandung: PT. Alumni. (2023).
- Istiqamah Hikmah, Siti Zainab Yanlua, Muhammad Akbar Yanlua, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law". *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Danpemikiran Islam*, Vol.3,No.1,September. (2024).
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Jaya, Agung Wiguna. "Konstitusional Syarat Pengangkatan Jaksa Agung Non Parpol Dalam Menjaga Independensi Dan Netralitas." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2024).
- Kurdi, Ibnu Mazjah. "Pemisahan Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan: Studi Atas Implementasi Trias Politica Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3.(2025).
- Muabezi Zahermann Armandz," Negara Berdasarkan *Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State*". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November. (2017)
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, dan M. Zuhdi. "Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022).
- Mufrohim, Ook, dan Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3.(2020).
- Nurtjahjo, Hendra. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliaryagencies) Di Indonesia: Tin.Jauan Hukum Tata Negara I. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, No. 3. (2005).
- Muhammad Mujab Nabil, Zahran Qolbi Salim, Antasena Yudha Pratama, dan Hadrian Satria Putra. "Perlindungan Konstitusional *State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS)* Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024)
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, dan M. Zuhdi. "*Asas Dominus Litis* Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Wajah Hukum* 6, no. 2.(2022).

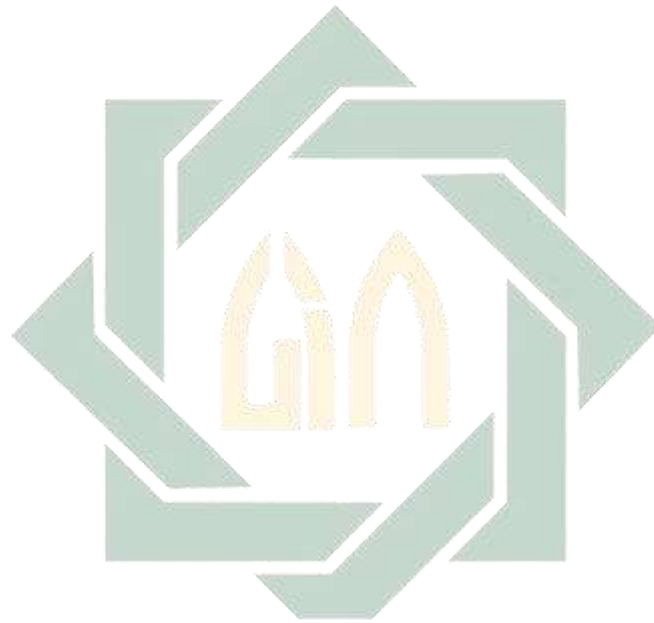
- Pakasi, Geraldy. INDEPENDENSI KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEJAKSAAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. t.t.
- Prabowo, Valentino Nathanael, Tjondro Tirtamulia, dan Hesti Armiwulan. "Independensi Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Calyptra* Vol.12 (2), (2024).
- Rizky, Windy Amalia Sahay, Adi T. Koesmo, dan Nurhikmah nachrawy. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 14 No. 5 (2025).
- Romaliani, Karina, Muhammad Arsad Nasution, dan Adi Syahputra Sirait. *Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. t.t.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024.
- Saragi, Johannes Hamonangan Pratama, dan Mexsasai Indra. Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General Dalam Perspektif Ketatanegaraan. 2, no. 1 (2025).
- Setiawan Dharma, Erwin Susilo. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 37, No 1, (2025)
- Silalahi, Rio Aldino Yosevan. "KEDUDUKAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN." *Jurnal Transparansi Hukum*. (2024).
- Sunarto," *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April (2016)
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1).(2014).
- Susanto Nur Agus," *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*", *Jurnal Yudisial*, Vol-IV, No-01, April. (2011)
- Susiani, Dina. "Pengantar Hukum Administrasi Negara." Tahta Media Group. (2024).
- Syamsudin, "Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu- Xviii/2020)". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Juli (2024)
- Triwulan Tutik Titik , "Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Prenadamedia Group, (2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Zulfikar M. Adnan Yazar,” Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy”. *Padjajaran Law Review* I, Desember (2013)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A